

BAB 1

PENDAHULUAN

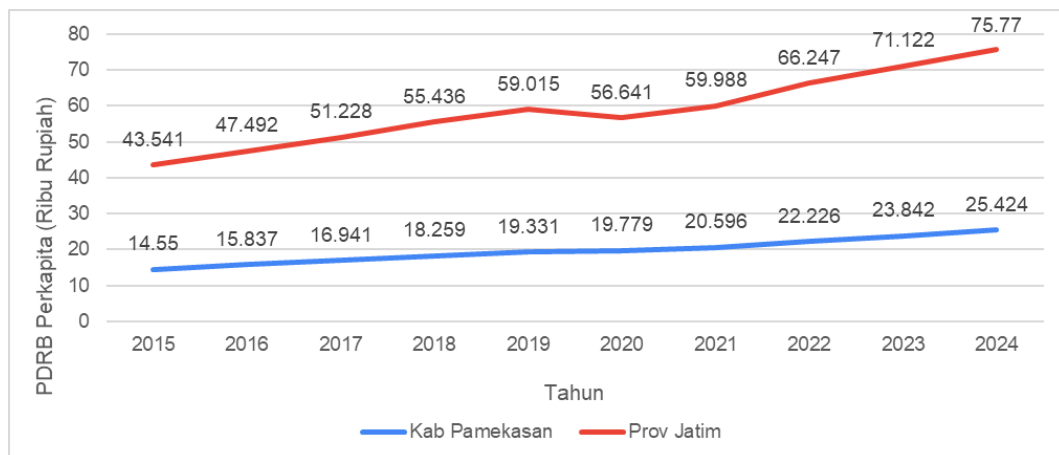
1.1 Latar Belakang

Pendapatan masyarakat desa merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan ekonomi di pedesaan. Pendapatan yang memadai tidak hanya memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Menurut Mankiw (2021), pendapatan merupakan balas jasa atas faktor produksi yang dimiliki individu, sedangkan Todaro & Smith (2020) menegaskan bahwa peningkatan pendapatan merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi karena berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan desa.

Pembangunan ekonomi desa menjadi strategi penting untuk mengurangi kesenjangan dengan wilayah perkotaan dan meningkatkan produktivitas masyarakat (Darwis et al., 2024). Todaro & Smith (2020) menjelaskan bahwa desa memiliki peran strategis sebagai fondasi pembangunan nasional, sehingga peningkatan ekonomi pedesaan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara luas. Tingkat kesejahteraan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga, karena pendapatan yang memadai mampu memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mengurangi risiko kemiskinan (Makmur, 2019). Dalam perspektif ekonomi tenaga kerja, pendapatan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, usia, pengalaman kerja, jam kerja, modal, serta kondisi pasar tenaga kerja. Pendidikan menjadi faktor penting karena dapat meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan yang lebih produktif dan berpendapatan lebih

tinggi (Pane, 2023). Dengan demikian, pendapatan masyarakat tidak hanya mencerminkan kesejahteraan, tetapi juga menunjukkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia suatu wilayah.

Upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa salah satunya dilakukan melalui penguatan kelembagaan ekonomi desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui pemanfaatan Dana Desa, BUMDes berperan sebagai lembaga ekonomi yang mengelola potensi lokal, menyediakan akses permodalan, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kegiatan usaha produktif masyarakat (Oktarina, 2023 ; Melda, 2024). Keberhasilan BUMDes tidak hanya bergantung pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal agar mampu berkembang secara berkelanjutan (Hestiana et al., 2024). Sebagai institusi ekonomi desa, BUMDes diharapkan mampu meningkatkan daya saing, mengoptimalkan potensi lokal, dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan (Arma et al., 2024). Keberadaan BUMDes juga diperkuat melalui UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 11 Tahun 2021 yang memberikan landasan hukum dalam pengelolaan BUMDes secara akuntabel dan partisipatif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Mandi & Maria, 2025).



Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan, 2015 – 2024

Gambar 1. 1 PDRB Perkapita Kabupaten Pamekasan

Data PDRB per kapita tahun 2015–2024 menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi baik di Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Pamekasan, meskipun terdapat perbedaan capaian yang cukup besar. PDRB per kapita Jawa Timur meningkat dari Rp43.541.000 pada tahun 2015 menjadi Rp75.770.000 pada tahun 2024, sementara Kabupaten Pamekasan meningkat dari Rp14.550.000 menjadi Rp25.424.000 pada periode yang sama. Meskipun mengalami pertumbuhan, nilai PDRB per kapita Pamekasan masih berada jauh di bawah rata-rata Jawa Timur, yaitu hanya sekitar sepertiga dari capaian provinsi pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi regional yang mencerminkan perbedaan produktivitas dan struktur ekonomi antara Kabupaten Pamekasan dan Jawa Timur secara keseluruhan. Perbedaan kapasitas ekonomi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan berkaitan dengan kondisi kemiskinan yang relatif lebih tinggi di Pamekasan (Falah & Rahmawati, 2024). Oleh karena itu, Kabupaten Pamekasan masih dapat dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat pendapatan relatif rendah dibandingkan rata-rata provinsi (Vaulina & Liana, 2015).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menjadi salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah karena peningkatan nilai PDRB per kapita dapat mencerminkan meningkatnya kapasitas ekonomi dan kemampuan konsumsi masyarakat (Puteri & Suasih, 2025). Dalam konteks pembangunan daerah, PDRB per kapita juga berhubungan dengan kemampuan daerah dalam mencapai kemandirian ekonomi dan fiskal (Ulah, 2024). Namun, peningkatan PDRB per kapita tidak selalu menghilangkan ketimpangan pembangunan, karena perbedaan struktur ekonomi antarwilayah masih dapat menyebabkan disparitas pendapatan (Syuhada et al., 2023). Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pendidikan, tingkat pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) yang saling berinteraksi dalam menentukan capaian pembangunan ekonomi daerah (Rahayu & Samsuddin, 2025).

Pertumbuhan PDRB per kapita menunjukkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi daerah, namun pertumbuhan tersebut perlu diikuti dengan pemerataan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti BUMDes agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas. Pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes terbukti memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Moekti & Hadiyan, 2023). Dalam konteks tersebut, BUMDes memiliki potensi strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan akses ekonomi lokal (Putra & Idialis, 2025). Namun, manfaat BUMDes belum sepenuhnya merata karena efektivitas pengelolaannya berbeda antar desa. Kondisi ini sejalan dengan temuan Masita & Idialis (2024) yang menunjukkan bahwa kemiskinan di Pamekasan bersifat persisten akibat keterbatasan keterampilan dan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Tabel 1. 1 Pendapatan Sebelum dan Sesudah adanya BUMDes

Pendapatan Sebelum BUMDes	frekuensi (orang)	Pendapatan Sesudah BUMDes	frekuensi (orang)
Rp 800,000	59	Rp 900,000	16
Rp 900,000	6	Rp 1,300,000	10
Rp 1,300,000	12	Rp 1,500,000	28
Rp 1,800,000	15	Rp 1,800,000	2
Rp 2,100,000	5	Rp 1,900,000	26
Rp 2,200,000	8	Rp 2,400,000	23
total	105		105

Sumber: data diolah, 2025

Hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan kategori pendapatan pada sebagian BUMDes, namun kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara merata. Kondisi ini terlihat dari masih tingginya Indeks Kedalaman Kemiskinan yang menggambarkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Nilai indeks

yang semakin tinggi menunjukkan semakin besarnya kesenjangan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan minimum. Kabupaten Pamekasan masih menghadapi tantangan tersebut karena tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah dibandingkan dengan standar upah minimum daerah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Pamekasan pada Maret 2025 mencapai 12,77 persen atau sekitar 118,52 ribu jiwa. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 13,41 persen, tetapi penurunan kemiskinan belum sepenuhnya menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar akibat adanya kesenjangan antara tingkat pendapatan dan standar kebutuhan minimum.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya mampu mengurangi kedalaman kemiskinan masyarakat desa. Azmi et al., (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa program pembangunan desa melalui Dana Desa belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan kemiskinan karena pemanfaatannya masih lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik dibandingkan pengembangan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Kabupaten Pamekasan memiliki 130 BUMDes dengan tingkat perkembangan yang beragam, yaitu 43 BUMDes berstatus maju, 52 BUMDes berstatus tumbuh, dan 35 BUMDes berstatus perintis. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa BUMDes telah berkembang sebagai salah satu instrumen ekonomi desa dalam mengelola potensi lokal dan mendukung peningkatan

pendapatan masyarakat. Namun, keberadaan BUMDes belum secara langsung menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena manfaat ekonomi yang dihasilkan masih berbeda antarwilayah dan kelompok masyarakat.

Beberapa BUMDes telah mampu mengembangkan berbagai unit usaha seperti perdagangan, layanan keuangan, dan pengelolaan fasilitas desa yang membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Namun, kondisi ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Pamekasan masih menghadapi tantangan, terlihat dari tingginya tingkat kemiskinan dan masih rendahnya pendapatan sebagian masyarakat dibandingkan standar kebutuhan ekonomi daerah. Data menunjukkan bahwa pada Maret 2025 persentase penduduk miskin Kabupaten Pamekasan mencapai 12,77 persen atau sekitar 118,52 ribu jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi desa melalui BUMDes belum sepenuhnya memberikan dampak yang merata terhadap pendapatan masyarakat.

Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, klasifikasi status BUMDes menjadi perintis, tumbuh, berkembang, dan maju mencerminkan kapasitas kelembagaan, kinerja usaha, tata kelola organisasi, serta kontribusinya terhadap perekonomian desa. BUMDes berstatus maju umumnya telah memiliki tata kelola yang lebih baik, unit usaha yang berkelanjutan, serta kontribusi ekonomi yang lebih besar dibandingkan BUMDes yang masih berada pada tahap perintis (Hestiana et al., 2024). Salah satu contohnya adalah BUMDes Delta Mulia yang berada di Desa Panempan. BUMDes tersebut mengelola pasar desa, agen BRIlink, pembiayaan syariah (murabahah), layanan Samsat Bunda melalui Agen Posfin, serta unit pengelolaan TPS3R. Keberadaan unit-unit usaha tersebut bukan hanya membuka akses terhadap layanan publik dan keuangan, tetapi juga menciptakan

kegiatan ekonomi yang inklusif sehingga masyarakat tidak perlu bergantung pada wilayah perkotaan untuk memperoleh layanan administratif dan finansial.

Kondisi kenaikan garis kemiskinan, rendahnya PDRB Per kapita kabupaten Pamekasan dibandingkan dengan rata rata Provinsi Jawa Timur, serta kesenjangan antara pendapatan masyarakat desa dengan UMK menunjukkan bahwa peningkatan kondisi ekonomi masyarakat masih menjadi tantangan dalam pembangunan desa karena keberadaan BUMDes belum dapat secara langsung menunjukkan sejauh mana perubahan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih terdapat 82 responden yang memiliki pendapatan di bawah Rp2.000.000 per bulan, bahkan sebagian besar masih berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pamekasan yang sebesar Rp2.376.614 per bulan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan BUMDes belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata (Prihartini & Choiriyah, 2024).

Permasalahan penelitian dalam penelitian ini adalah adanya kebutuhan untuk memperoleh bukti empiris mengenai perubahan pendapatan masyarakat desa sebelum dan sesudah adanya BUMDes. Meskipun BUMDes telah dikembangkan sebagai salah satu strategi pembangunan ekonomi desa, keberhasilannya tidak cukup hanya dilihat dari jumlah BUMDes yang terbentuk atau kegiatan usaha yang dijalankan, tetapi juga perlu dievaluasi berdasarkan perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran program.

Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki peran dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat desa. Penelitian Nurhasan & Munawar (2020) menunjukkan bahwa BUMDes berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat melalui

pengembangan berbagai unit usaha desa, seperti usaha produktif rumah tangga, pasar desa, dan unit jasa lainnya. Namun, penelitian tersebut masih menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan peran BUMDes sehingga belum secara khusus mengukur perubahan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah keberadaan BUMDes. Selanjutnya, penelitian Senjaya dan Ansori menjelaskan bahwa BUMDes berperan dalam meningkatkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi desa. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada proses pemberdayaan serta peran aktor dalam pengelolaan BUMDes, sehingga belum memberikan gambaran kuantitatif mengenai perubahan kondisi ekonomi masyarakat setelah adanya BUMDes (Senjaya & Ansori, 2022).

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian. Pertama, sebagian besar penelitian mengenai BUMDes menggunakan pendekatan kualitatif, SEM, atau analisis deskriptif. Kedua, penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan indikator kinerja organisasi dan PADes sebagai *outcome*, sedangkan pendapatan masyarakat desa sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi desa masih relatif jarang diteliti. Ketiga, kajian mengenai BUMDes sebagian besar masih berfokus pada peran, pengelolaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara deskriptif. Penelitian yang secara khusus menguji perubahan pendapatan masyarakat dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah adanya BUMDes masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi *research gap* tersebut melalui analisis kuantitatif menggunakan *Wilcoxon Signed-Rank Test* untuk mengetahui perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya BUMDes.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada aspek empiris dengan mengevaluasi

perubahan pendapatan masyarakat desa melalui pendekatan perbandingan sebelum dan sesudah adanya BUMDes di Kabupaten Pamekasan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi atau pengelolaan kelembagaan secara deskriptif, penelitian ini memberikan bukti statistik mengenai perubahan pendapatan masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan BUMDes dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat perubahan pendapatan masyarakat desa sebelum dan sesudah adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?
2. Bagaimana perbedaan tingkat pendapatan masyarakat desa setelah adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis perbedaan tingkat perubahan pendapatan masyarakat desa sebelum dan sesudah adanya BUMDes.
2. Menganalisis perbedaan pendapatan masyarakat desa setelah adanya BUMDes.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai evaluasi dampak keberadaan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) melalui analisis perubahan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya BUMDes. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian empiris mengenai peran kelembagaan ekonomi desa dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yang meliputi:

1. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam mengetahui sejauh mana keberadaan BUMDes memberikan perubahan terhadap pendapatan masyarakat. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan strategi pengembangan BUMDes agar lebih mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.

2. Bagi Pengelola BUMDes

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengelola BUMDes dalam mengevaluasi kinerja dan pengembangan unit usaha yang dijalankan. Informasi mengenai perubahan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya BUMDes dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha desa.

3. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat dari keberadaan BUMDes, khususnya dalam meningkatkan peluang usaha dan pendapatan masyarakat desa.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan evaluasi program pembangunan desa, khususnya mengenai dampak keberadaan BUMDes terhadap aspek ekonomi masyarakat dengan menggunakan pendekatan perbandingan sebelum dan sesudah.